
REPUBLIK ARAB MESIR MASA PRESIDEN HUSNI MUBARAK

Wulandari Nurul Utami
Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
Pinkla2398@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menguraikan kepemimpinan Husni Mubarak yang memimpin Mesir selama tiga puluh tahun. Penulisan ini bertujuan menjelaskan proses pengangkatan, pemilihan Husni Mubarak serta perkembangan peradaban Mesir pada masa pemerintahannya. Metode yang digunakan merupakan metode sejarah menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dengan mengumpulkan beberapa sumber tertulis dari berbagai artikel dan buku mengenai Husni Mubarak kemudian disatukan dalam bentuk tulisan. Hasil tulisan ini mengurai proses pengangkatan dan pemilihan Husni Mubarak sebagai Presiden Mesir. Kemudian menjabarkan perkembangan peradaban Islam dalam berbagai aspek semenjak terpilihnya Husni Mubarak sebagai Presiden Mesir pada tahun 1981 dan lengser dari jabatan pada tahun 2011 dalam peristiwa Arab Spring. Dengan begitu didapatkan gambaran tentang kehidupan Republik Arab Mesir pada masa Husni Mubarak.

Kata kunci: *Husni Mubarak, Presiden Mesir*

Abstract

This paper describes the leadership of Hosni Mubarak who led Egypt for thirty years. This writing aims to explain the process of appointment, election of Hosni Mubarak and the development of Egyptian civilization during his reign. The method used is a historical method using literature study data collection techniques by collecting several written sources from various articles and books about Hosni Mubarak and then combined in written form. The results of this paper describe the process of appointment and election of Hosni Mubarak as President of Egypt. Then describes the development of Islamic civilization in various aspects since the election of Hosni Mubarak as President of Egypt in 1981 and his resignation from office in 2011 in the Arab Spring event. Thus, a picture of the life of the Arab Republic of Egypt during the time of Hosni Mubarak is obtained.

Keywords: *Hosni Mubarak, President of Egypt*

A. Pendahuluan

Husni Mubarak lahir pada 04 Mei 1928, ketika menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ia bergabung dengan Akademi Militer sehingga mendapatkan gelar *Bachelor's Degree* yang berkaitan dengan Pengetahuan Militer pada tahun 1949. Pada tahun 1950 ia kemudian bergabung dengan Akademi Angkatan Udara dan kembali meraih gelar *Bachelor's Degree* pada Pengetahuan *Aviation* kemudian ia mengajar di Akademi Angkatan Udara pada tahun 1952-1959. Pada tahun 1964 ia di angkat sebagai Kepala Delegasi Militer Mesir. Di bawah Konstitusi Mesir 1971, Mubarak memiliki kuasa yang luas atas Mesir. Bahkan ia di anggap banyak orang sebagai diktator, meskipun moderat. Ia di kenal karena posisinya yang netral dalam konflik Israel-Palestina dan sering terlibat dalam negosiasi antar kedua pihak (Anthony, n.d.).

Setelah bergabung di Akademi Militer *Frounz* (Uni Soviet), ia menjadi Komandan Pangkalan Udara Barat Kairo (1964) dan menjabat Direktur Akademi Angkatan Udara pada tahun 1968. Pada tahun 1969, ia menjabat Kepala Staf Angkatan Udara dan Komandan Angkatan Udara serta Wakil Menteri Perang (1972). Pada 1974 ia dipromosikan ke peringkat Letnan Jenderal dan Wakil-Presiden Republik Arab Mesir (1975). Pada 1979 ia menjabat Wakil-Presiden Partai Demokratik Nasional (NDP) dan langsung menjabat Presiden Republik Arab Mesir pada 1981 (Anthony, n.d.).

Dilihat dari jejak perjalanan pendidikan dan karir Presiden Husni Mubarak jelas bahwasanya beliau memiliki latar belakang militer yang kuat. Presiden Husni Mubarak berkuasa dalam kurun waktu 30 tahun. Dalam perjalanan masa 30 tahun pemerintahan Husni Mubarak dikenal dengan pemerintahan yang diktator. Untuk melihat bagaimana Mesir di masa kepemimpinan Husni Mubarak serta peradaban Islam di dalamnya akan penulis paparkan pada bagian selanjutnya.

B. Metode Penulisan

Tulisan ini menggunakan metode sejarah (Kuntowijoyo, 2018), dengan teknik mengumpulkan sumber melalui studi kepustakaan. Dengan pendekatan menggunakan bahan tertulis yang membahas tentang Husni Mubarak baik dalam bentuk artikel maupun buku yang dijadikan landasan utama dalam mengumpulkan sumber. Terdapat empat metode sejarah yang mana dalam tulisan ini akan dikumpulkan semua tulisan-tulisan yang terkait dengan Husni Mubarak, kemudian disaring serta akhirnya disatukan dan kemudian dituangkan hasilnya secara keseluruhan dalam sebuah tulisan yang berjudul Republik Arab Mesir Pada Masa Presiden Husni Mubarak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengangkatan dan Pemilihan Husni Mubarak

Mubarak diangkat menjadi Wakil Presiden Mesir mendampingi presiden Mesir saat itu pada April 1975. Tugas pertama yang dilaksanakan oleh Husni Mubarak adalah mengurus berbagai perjanjian dengan negara-negara Arab dan Timur Tengah berkaitan dengan perang melawan Israel. Jabatan Presiden Mesir keempat diperoleh oleh Husni Mubarak ketika Anwar Sadat diserang oleh kelompok Jihad Islam yang menentang keras perjanjian damai antara Mesir dengan Israel. Dalam sebuah iring-iringan kemenangan merayakan Operasi Badr di Kairo, Sadat ditembak pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok tersebut. (Firman, n.d.) Sosok Husni Mubarak begitu melekat pada jati diri masyarakat Mesir semenjak ia menjadi Presiden Mesir menggantikan kepemimpinan Anwar Sadat yang tewas tertembak.

Husni Mubarak naik menjadi Presiden Mesir pada 14 Oktober 1981. Selama masa kepemimpinannya Husni Mubarak banyak berhadapan dengan berbagai kejadian krusial yang melanda Mesir. Pada tahun 1989, ketika Mesir resmi kembali bergabung dengan Liga Arab, serta markas kemudian dipindahkan kembali ke Kairo. Penangguhan keanggotaan terjadi karena perjanjian perdamaian dengan Israel yang dilakukan Anwar Sadat. Israel menolak mengunjungi negara tersebut, seperti tercatat dalam laporan Olfat M. El Tohamy untuk *The Christian Science Monitor* berjudul "*Egypt's Husni Mubarak Picks up Sadat's Reins: Profile.*" Mubarak menjaga jarak dengan Israel dengan jalan menjadi tuan rumah dan penengah dari tiap pertemuan yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Pada Oktober 2000, terjadi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Yasser Arafat dari PLO, Perdana Menteri Israel Ehud Barak, Raja Abdullah dari Yordania, Sekjen NATO Javier Solana, dan Sekjen PBB Kofi Annan yang dilaksanakan di Sharm el-Sheikh. Mubarak bertindak sebagai tuan rumah. Belajar dari kejadian pembunuhan yang terjadi terhadap pemimpin Mesir terdahulu, Mubarak pada tahun-tahun pertama kekuasaannya memperluas sektor keamanan seperti Layanan Investigasi Keamanan Negara dan Pasukan keamanan Pusat. Selanjutnya, Tarek Osman dalam bukunya berjudul *Egypt on the Brink*, Mubarak seringkali meminta nasihat kepada staf keamanan, menteri dalam negeri, komandan militer dan kepala badan intelijen negara (Firman, n.d.).

Posisi Mubarak tidak hanya menjadi penghambat Israel dalam upaya berdamai dengan Mesir, tetapi juga bagi para kelompok fundamentalis Islam di Mesir, sama seperti masa kepemimpinan Anwar Sadat. Lawrence Wright dalam bukunya *The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11* menyebutkan usaha pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok jihadis Islam terjadi pada 1995 dengan melibatkan gas beracun. Mubarak lolos ketika dirinya tengah berada di Ethiopia untuk konferensi Organisasi Persatuan Afrika. Meski keras

terhadap teroris, Husni Mubarak tidak setuju dengan Perang Irak 2003. Konflik Israel-Palestina bagi Husni Mubarak harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurut laporan CNN, Husni Mubarak juga menyebutkan bahwa perang tersebut justru akan melahirkan 100 Bin Laden. Namun, bagaimanapun Husni Mubarak juga tidak mendukung penarikan cepat pasukan AS dari Irak karena berpikiran bahwa hal tersebut bisa saja menimbulkan kekacauan (Firman, n.d.).

Kemudian, pertama kali dalam masa kepemimpinan Husni Mubarak, pemilu demokrasi dilaksanakan pada tahun 2005 yang memberikan kemungkinan terdapatnya calon-calon yang dapat dipilih menjadi Presiden Mesir. Namun bagaimanapun, lembaga pemilu dan aparat keamanan tetap ada di bawah kendali presiden. Pemilu yang dijadwalkan mulai 7 September 2005 ini mengusung tiga nama calon Presiden. Husni Mubarak dari Partai Nasional Demokratik (Al-Hizb Al-Watani Al-Dimuqrati) sebagai petahana, Ayman Nour dari Partai Kemarin (Hizb al-Ghad), dan terakhir Numan Gomaa dari Partai NewWafd (Hizb al-Wafd al-Jadid). Hasilnya dapat ditebak : Husni Mubarak keluar sebagai pemenang dengan 88,6 persen suara. Nasib lawannya, Ayman Nour yang merupakan penentang Hosni Mubarak, dijatuhi hukuman kerja paksa dan lima tahun penjara oleh Pengadilan Mesir karena kasus pemalsuan yang dialamatkan kepadanya (Firman, n.d.).

Selanjutnya, pada masa awal pengangkatan Husni Mubarak dalam melaksanakan politik dalam pemerintahan Mesir sama dengan kepemimpinan sebelumnya dengan lebih menekankan terhadap perbaikan perekonomian Mesir yang sebelumnya memiliki laju pertumbuhan yang lambat. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan otoriter, selain itu Husni Mubarak juga mempunyai sifat kepemimpinan yang kontroversial selama pemerintahannya. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi demonstrasi menentang pemerintahan Husni Mubarak yang memberikan Batasan aspirasi dan ekspresi rakyat dalam mengungkapkan kekecewaan terhadap pemerintah. Sikap otoriter Husni Mubarak juga diterapkan terhadap media massa yang tidak sejalan. Husni Mubarak yang berkuasa kurang lebih selama 30 tahun berhasil membuat demokrasi dimana pemilihan presiden hanya diisi satu kandidat tunggal. Keberadaan partai oposisi pun juga selalu berada dalam pengawasan partai pemerintah.

2. Perkembangan Peradaban Mesir Masa Husni Mubarak

a. Keagamaan

Pada masa kepemimpinan Husni Mubarak ini, menguatlah aktivisme Islam di kalangan kaum muda yang disebabkan oleh pemberian kesempatan politik oleh Husni Mubarak terhadap kelompok Islamis untuk tumbuh dan

berkembang. Perkembangan Islamisme di Mesir masa pemerintahan Husni Mubarak berkaitan erat dengan pola pikir perempuan muda muslim kelas menengah. Mereka mempunyai pandangan bahwasanya prioritas bagi seorang perempuan itu berada di rumah. Mereka akan bekerja ketika memenuhi empat syarat dijadikan pegangan, diantaranya yaitu ketika seorang perempuan tidak diperlukan di rumah, pekerjaannya memiliki nilai inheren, suaminya menyetujui dan pekerjaannya tersebut tidak mengharuskannya bercampur dengan lawan jenis. Disamping adanya fakta bahwa gerakan Islamisme berkembang pada masa Husni Mubarak, gerakan feminisme juga turut berkembang, hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya persinggungan antara keduanya, serta memiliki kepentingan politik yang dapat diraih apabila dilakukan secara bersama (Reza Bakhtiar Ramadhan, 2018).

Pengaruh gerakan Islamisme yang gencar dalam agenda Islamisasinya telah melahirkan kelompok perempuan Islamis yang memegang teguh agama sebagai ideologi politik. Jilbab baru telah menjadi fenomena sosial yang terjadi pada masa pemerintahan Husni Mubarak. Para perempuan kelas menengah, telah menampilkan babak baru gerakan feminisme di Mesir. Sebagaimana tujuan mereka mengenakan jilbab, adalah sebagai bentuk protes terhadap segala bentuk ketidaksetaraan, yang berkembang menjadi simbol perlawanan kaum perempuan. Fenomena ini juga mengubah paradigma mengenai perempuan, khususnya perempuan Mesir. Bahkan, terdapat arus transformasi gerakan feminisme Mesir yang berkembang melalui fenomena ini, terutama perannya dalam ruang publik (Reza Bakhtiar Ramadhan, 2018).

b. Politik

Husni Mubarak yang berasal dari militer dalam politik pemerintahannya terdapat perubahan konstitusi. Dibawah konstitusi Mesir 1981 Presiden Mesir mempunyai kekuasaan yang luas. Konstitusi 1981 merupakan keadaan darurat yang diberlakukan semenjak kelompok Islam garis keras yang ditangkapi dan ditahan. Kelompok Islam garis keras tersebut pada umumnya memprotes sikap Mubarak yang berusaha netral dalam konflik Israel-Palestina (Kartini, 2016, hal. 115).

Meskipun keras terhadap lawan politiknya, Mubarak masih memberikan sedikit ruang berpolitik, dengan dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Namun, pemilu tersebut bersifat formalitas guna menunjukkan terdapatnya demokrasi. Secara substansi, pemilu yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan itu tidak berlaku pada masa Husni Mubarak. Hal ini dikarenakan Husni Mubarak selalu terpilih kembali menjadi Presiden Mesir.

Sementara itu, di Parlemen Mesir, Partai Nasional Demokrat (NDP) selalu menang dalam pemilu. Anggota NDP merupakan mayoritas dalam parlemen. Partai politik bentukan militer tersebut selalu mendukung kebijakan Husni Mubarak (Kartini, 2016).

Pada masa Husni Mubarak, militer juga mendapatkan keuntungan dengan adanya Dewan Agung Militer. Mereka menduduki posisi istimewa dalam kepolitikan Mesir waktu itu. Dewan ini dianggap sebagai “penjaga” negara Mesir. Selain kekuatan militer, di Mesir juga terdapat kelompok liberal sekuler. Mereka biasanya merupakan kaum menengah-atas terpelajar yang biasa hidup bebas. Kelompok ini, meskipun kurang mengakar dalam kehidupan masyarakat, namun mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan perpolitikan Mesir (Kartini, 2016).

Disamping dua kekuatan politik tersebut juga terdapat kekuatan Masyarakat Islam. Mereka ini tunggal dan terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok dan golongan. Pasca lengsernya Presiden Husni Mubarak tampak terlihat kekuatan Islam menggeliat ke dunia politik. Disana ada kekuatan Islam dari kelompok Salafi, kelompok al-Ikhwan, dan lain sebagainya.

Dinamika politik Mesir mengalami pasang surut, imbas dari apa yang disebut sebagai *Arab Spring*, politik Mesir mengalami perubahan yang cukup drastis. Kekuasaan presiden Husni Mubarak yang berlangsung cukup lama akhirnya tumbang pada Februari 2011. Lengsernya Husni Mubarak memberikan ruang perubahan terhadap politik Mesir. Ada demokratisasi disana yang ditandai dengan pemilihan umum anggota parlemen dan pemilu presiden.

c. Ekonomi

Perekonomian pada masa Husni Mubarak merupakan era di mana militer mempunyai hak-hak yang sama dengan sipil, atau biasa disebut dengan dwi-fungsi militer. Hal ini tidak luput juga dalam bidang ekonomi yang juga turut dimasuki oleh pihak militer. Pada masa ini, militer diberikan otonomi yang luas untuk membuat dan menjalankan industri bisnis militer. Militer Mesir telah demikian menjadi faktor kunci ekonomi sejak 1980-an, baik itu di sektor real estate, produksi peralatan rumah tangga, dan membuka tujuan wisata baru. Menurut perkiraan, kegiatan bisnis militer membentuk 20 persen dari output ekonomi tahunan negara itu. Berbeda dengan masa pemerintahan Anwar Sadat yang memotong anggaran belanja militer dan sangat membatasi peran dan keterlibatan militer dalam urusan publik dan politik, Husni Mubarak justru sangat menyambut adanya kontribusi dan keikutsertaan

militer dalam pembangunan ekonomi Mesir dan menjamin peranan militer sebagai penjamin stabilitas dalam negeri. Husni Mubarak telah memberikan lampu hijau kepada militer untuk memperoleh bagian yang lebih dalam anggaran pengeluaran pemerintah. Militer juga diberikan keleluasaan untuk mengatur aktivitas pemerintah dalam pembangunan serta untuk memperkuat pengaruhnya dalam politik dalam negeri Mesir (Ardhani, n.d.).

Sayap ekonomi yang dijalankan militer Mesir diawali dari pembentukan Organisasi Militer untuk Proyek Sipil pada 1981 yang terlibat dalam bermacam-macam pembangunan sarana publik seperti konstruksi jalan raya dan jembatan, jaringan telekomunikasi, dan proyek-proyek lainnya. Sejak saat itu, militer pada masa Husni Mubarak terlibat dalam semua kegiatan pembangunan yang meliputi pembangunan jalur kereta api, *flyover*, kanal irigasi, saluran pipa jarak jauh, jaringan transportasi, serta pabrik-pabrik, laboratorium, klinik, dan pusat-pusat pelatihan. Pengusaha bidang pertahanan dan non-pertahanan yang berjalan bersama-sama dapat disebut sebagai *Military Industrial Business Commercial Complex* (MIBCC). Di Mesir, MIBCC adalah “perusahaan komersial yang dikelola militer besar yang masuk ke setiap sudut masyarakat Mesir,” memproduksi makanan (minyak zaitun, susu, roti dan air minum kemasan), semen dan bensin, kendaraan (*Cherokee dan Wrangler*), serta infrastruktur. Militer mengembangkan usaha ekonomi yang luas karena beberapa alasan. Pertama, mereka memiliki “kepentingan perusahaan” yang mereka harapkan negara untuk memenuhi: gaji tetap, perumahan yang layak dan tunjangan seperti pinjaman berbunga rendah dan fasilitas perbelanjaan khusus. Kedua, perusahaan militer cenderung lebih efisien dan efisien daripada sektor publik. Namun, mereka mungkin menghambat upaya negara guna meraih privatisasi dan liberalisasi ekonomi pada kesadaran bahwa perusahaan swasta lebih efisien dan produktif. Ketiga, hirarki militer mungkin benar-benar percaya bahwa perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan citra mereka sendiri (Ardhani, n.d.)

Industri Militer Kompleks Mesir sangat berbeda dari Amerika Serikat. Di AS komponen industri militer menghasilkan senjata dan perlengkapan untuk militer, tetapi adalah milik pribadi. Industri non-pertahanan bukan merupakan bagian dari kompleks. Namun di Mesir militer benar-benar memiliki beberapapemasoknya. Selain itu militer juga memiliki banyak industri yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan seperti resor hotel. Masuknya militer dalam sektor ekonomi juga didukung oleh peran yang dijalankan oleh Menteri Pertahanan Abdul Halim Abu Ghazalah yang memiliki visi yang

sama dengan Husni Mubarak mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama dengan militer yang dapat dijadikan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Husni Mubarak memberikan ruang bagi Abu Ghazalah untuk menjalankan proyek-proyek yang terbilang cukup ambisius, yang kebanyakan bukan bagian dari bidang-bidang yang biasa ditangani oleh Departemen Pertahanan. Abu Ghazalah memiliki otoritas untuk mengawasi rencana pembangunan nasional dan memimpin pihak militer untuk mengambil langkah yang berbeda dalam proses pembuatan kebijakan dalam negeri (Ardhani, n.d.).

Pergeseran peran militer dalam masa pemerintahan Husni Mubarak ini disebut oleh Robert Springbrong sebagai perluasan horisontal (*horizontal expansion*) dalam peran militer di suatu negara. Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan hal ini untuk terjadi di Mesir :

- 1) Adanya rasa percaya bahwa sifat-sifat organisasional dalam militer yang kuat dapat menjadi penggerak yang efektif bagi usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- 2) Pendekatan Presiden Mubarak dengan pihak militer
- 3) Potensi untuk mengurangi pengeluaran untuk pembangunan karena gaji tentara yang rendah, kepemilikan alat berat, dan sumber daya manusia yang memadai.
- 4) Adanya kebutuhan untuk menurunkan sejumlah besar tentara dalam kegiatan yang produktif ketika kebutuhan akan pertahanan sedang berada dalam level yang rendah (Ardhani, n.d.).

Selanjutnya, pada masa 1990an Husni Mubarak mulai fokus terhadap reformasi pada bidang ekonomi. Reformasi yang dilakukan pada bidang ekonomi ini yaitu terkait dengan bantuan terhadap pembiayaan usaha kecil, pinjaman bagi pengusaha perempuan, membangun garasi bagi armada Kairo serta menyediakan bahan ajar yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan. Selain itu, tentunya juga terdapat proyek guna memperkuat militer seperti pelatihan dan penyediaan pesawat jet tempur, artileri modern, tanki, dan kendaraan personel lapis baja (Karlinda Rahma Syahida, 2017).

d. Sosial

Mesir merupakan sebuah negara yang padat penduduk. Total populasi masyarakat di Mesir adalah 80 juta jiwa. Hampir setengah dari total tersebut yang hidup dibawah garis kemiskinan menurut standar minimum PBB yaitu US\$ 2/hari. Hal tersebut diakibatkan pemerintahan negara yang korup dan pemusatan ekonomi pada kalangan atas. Diakibatkan ketidakmampuan

pemerintah mengatasi keadaan ekonomi yang semakin tidak merata lah akhirnya kemarahan rakyat Mesir akhirnya keluar. Rakyat Mesir hidup menderita dan ingin memrotes keadaan pemerintahan, namun mereka tidak leluasa dalam melakukan kritik terhadap pemerintahan Presiden Husni Mubarak. Mengeluarkan pendapat yang berindikasi menjatuhkan nama Husni Mubarak, rakyat Mesir bisa berakhir dipenjara atau disiksa. Akibat hal tersebut rakyat Mesir memilih mengeluarkan pendapat dan bersuara di media sosial (Ratih Maharani Eka Putri, n.d.).

Sejak masa pemerintahan Husni Mubarak, rakyat Mesir mengalami tekanan dan kekangan dalam bertindak dengan otoritas penuh Husni Mubarak sebagai seorang pemimpin, diperparah dengan makin tingginya tingkat korupsi di pemerintah yang dilakukan demi kepentingan pribadi maupun golongannya. Dengan kian merajalelanya korupsi di pemerintahan Husni Mubarak, maka tingkat kesejahteraan rakyat yang berada di luar lingkaran kekuasaan dalam rezim Husni Mubarak sangat rendah, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di Mesir sangat tinggi (Femi Fernando dan Syafri Harto, n.d.).

Segala permasalahan yang menyebabkan ketidak-stabilan ekonomi di Mesir mengakibatkan harga bahan pangan yang terus meningkat, kemiskinan yang terus bertambah, lapangan pekerjaan yang minus. Semua permasalahan diperparah dengan tekanan dari rezim terhadap rakyat dimana kebebasan berekspresi yang dikekang sedemikian rupa, kepastian hukum yang buruk. Hal ini telah meledakkan kesabaran rakyat Mesir selama 30 tahun kepemimpinan Husni Mubarak. Rezim otoriter dan represif ini telah mengakumulasi kebencian jutaan rakyat Mesir terhadap sang presiden mereka sendiri. Dengan semangat persatuan melawan penguasa yang otoriter dan diktator, sebagian besar warga Mesir menyatakan tekad untuk menumbangkan rezim Husni Mubarak yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, sehingga mereka turun ke jalanan demi perjuangan melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Itulah sebabnya, seluruh warga Mesir mulai bergabung dengan aksi massa dalam sebuah demonstrasi (Femi Fernando dan Syafri Harto, n.d.).

Kemudian ini kemudian disulut oleh kudeta rakyat Tunisia terhadap sang presidennya sendiri, Ben Ali. Terinspirasi terhadap fenomena di Tunisia itu, rakyat Mesir secara simultan merasa terberanikan untuk menggulingkan pemerintahannya yang juga diktator seperti negara Tunisia. Rakyat Mesir pun menjadi yakin dengan *people power* (kekuatan rakyat) dan mampu menggulingkan pemerintahan yang otoriter. Krisis yang berlangsung selama

beberapa hari tanpa ada kepastian masa depan Mesir, membuat pemerintah AS turun tangan mengatasinya. Intervensi AS terhadap permasalahan di Mesir dikarenakan AS mempunyai kepentingan terhadap Mesir dan Timur Tengah. Mesir merupakan penghubung kepentingan AS di Timur Tengah, termasuk hubungan dengan Israel (Femi Fernando dan Syafri Harto, n.d.).

Kebijakan Husni Mubarak yang terlihat lebih pro-Israel dalam konflik Israel dengan Palestina tak lepas dari peran dan pengaruh AS terhadap pemerintah Mesir. Pada tanggal 28 Januari 2011, Presiden AS, Barak Obama meminta Husni Mubarak untuk segera mengambil kebijakan kongkret guna merealisasikan reformasi politik dan menghentikan tindak kekerasan terhadap para demonstran. Dengan menjaga posisi Husni Mubarak dan kepentingannya terhadap Mesir, kebijakan AS selalu mengatas-namakan demokrasi dan menjunjung HAM. Atas desakan AS, dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Husni Mubarak pun membubarkan kabinetnya dan membentuk pemerintahan baru. Akhirnya, pada hari jumat tanggal 11 Februari 2011, secara mengejutkan Omar Suleiman mengumumkan pengunduran diri Husni Mubarak dari kekuasaan yang dikuasai selama 30 tahun di Mesir (Femi Fernando dan Syafri Harto, n.d.).

e. Pendidikan

Agama Islam adalah agama negara di Mesir, dan bahasa Arab bahasa resmi Negara. Pendidikan wajib selama 5 tahun pada pendidikan dasar, dan dapat ditambah ke tingkat pendidikan yang tinggi. Pendidikan adalah gratis pada sekolah-sekolah negeri. Negara mengawasi seluruh kegiatan pendidikan dan menjamin otonomi universitas dan pusat-pusat penelitian dengan catatan bahwa semua kegiatan itu diarahkan pada usaha-usaha keperluan masyarakat dan pada peningkatan produktivitas. Penghapusan buta huruf (iliterasi) merupakan tugas nasional, dan Islam adalah pelajaran dasar dalam kurikulum (Zainal Hakim, 2021).

Sistem pendidikan di Mesir, sejak taman kanak-kanak sudah diwajibkan menghafal Al-Quran. Di Universitas Al-Azhar, misalnya, bagi mahasiswa Mesir program S-1 diwajibkan menghafal 15 juz (setengah) Al-Quran, program S-2 diwajibkan menghafal seluruh Al-Quran. Adapun program S-3, tinggal diuji hafalan sebelumnya. Kewajiban hafal Al-Quran ini tidak berlaku bagi mahasiswa asing non-Arab, di mana program S-1 diringankan, yaitu hanya diwajibkan hafal delapan juz Al-Quran, dan program S-2 sebanyak 15 juz Al-Quran, sementara program S-3 baru diwajibkan hafal seluruh Al-Quran. Sementara itu, Pemerintah Mesir dilaporkan setiap tahun

mengalokasikan dana khusus sebesar 25 juta dolar AS (1,2 miliar pound Mesir) untuk penghargaan bagi penghafal Al-Quran (Zainal Hakim, 2021).

Penghargaan itu diberikan setiap peringatan hari-hari Besar Islam bagi pemenang hifzul (penghafal) Al-Quran, berupa uang tunai maupun dalam bentuk beasiswa dan tunjangan hidup. Sudah menjadi tradisi di negeri Seribu Menara itu, perlombaan hafal Al-Quran di setiap hari-hari besar Islam dilakukan secara serentak dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Di Mesir, perlombaan hafal Al-Quran atau, musabaqah hifzil Quran memang lebih menonjol, ketimbang musabaqah tilawatil Quran (MTQ) yang mengutamakan bacaan, suara, dan lagu (Zainal Hakim, 2021).

D. Kesimpulan

Husni Mubarak merupakan pemimpin Mesir dalam kurun waktu tiga dekade atau selama tiga puluh tahun. Mulai menjabat sebagai presiden Mesir pada tahun 1981 setelah peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat. Dalam kepemimpinan Husni Mubarak itu tidak lepas dari latar belakang beliau yang seorang militer, dapat dikatakan beliau merupakan pemimpin yang diktator. Sebab di masa kepemimpinannya ruang gerak masyarakat Mesir saat itu terbatas dan tidak leluasa dalam memberikan aspirasinya. Di awal tahun-tahun kepemimpinan beliau, beliau memperluas sektor keamanan seperti Layanan Investigasi Keamanan Negara dan Pasukan keamanan Pusat. Hal yang menonjol selama kepemimpinan Husni Mubarak adalah dibidang militernya karena latar belakang beliau yang seorang militer. Selain itu dalam hal perekonomian di masa-masa kepemimpinannya perekonomian rakyat Mesir tidak rata serta tingkat pengangguran yang tinggi. Serta dalam bidang pendidikan Islam merupakan landasan dasar bagi kurikulum di Mesir. Lengsernya Husni Mubarak pada tahun 2011 merupakan salah satu dampak dari peristiwa *Arab Spring* yang terjadi pada saat itu. Revolusi yang terjadi di Tunisia menyulut semangat rakyat Mesir untuk melakukan revolusi dengan hasil Husni Mubarak mundur dari jabatan presiden yang telah beliau emban dalam kurun waktu kurang lebih tiga puluh tahun.

E. Daftar Pustaka

- Anthony. (n.d.). *Biografi Presiden Husni Mubarak*.
- Ardhani, I. (n.d.). *Peranan Militer Dalam Politik Dan Ekonomi Di Mesir Tahun 1981-1987*. <https://mirfana.wordpress.com/2013/07/12/peranan-militer-dalam-politik-dan-ekonomi-di-mesir-tahun-1981-1987/>.
- Femi Fernando dan Syafri Harto. (n.d.). *Faktor-faktor yang Menyebabkan Hosni Mubarak Turun dari Kursi Kepresidenannya (2011)*.
- Firman, T. (n.d.). *Kejayaan dan Kejatuhan Husni Mubarak Sang Diktator Mesir*. Tirto.id.

- Karlinda Rahma Syahida. (2017). *Peran Gerakan Kifaya Dalam Perubahan Sistem Politik Mesir Masa Husni Mubarak (2003-2008)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Kartini, I. (2016). *Agama dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya*. PT Dunia Pustaka Jaya.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. PT Tiara Wacana Yogya.
- Ratih Maharani Eka Putri. (n.d.). *Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Jatuhnya Rezim Pemerintahan Hosni Mubarak di Mesir Tahun 2011*.
- Reza Bakhtiar Ramadhan. (2018). *Fenomena Jilbab Baru di Mesir : Transformasi Gerakan Feminisme Mesir Pada Masa Pemerintahan Husni Mubarak*. UIN Sunan Kalijaga.
- Zainal Hakim. (2021). Pendidikan Islam di Mesir. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 1, 29–30.